

Kebijakan Dynamic Defence Force Jepang dalam Merespon Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara (2010-2016)

Jeremia Kevin Paliama¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Adi P. Suwecawangsa³⁾
^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: paliamaKevin@unud.ac.id¹⁾, rainypriadarsini@unud.ac.id²⁾, [adisuwecawangsa @unud.ac.id](mailto:adisuwecawangsa@unud.ac.id)³⁾

ABSTRACT

North Korea frequently conduct tests of nuclear weapons has made Japan a worried over these actions. Although North Korea does not directly target the missile to the Japan territorial, still Japan government criticized sharply over the nuclear weapons test. North Korea's nuclear weapons that can directly reach Japan frequently surely make Japan feel threatened. Japan decided to change the military concept from Basic Defence Force t into a Dynamic Defence Force. The base Defence Force Basic defense Concept focused on building strong-power passive defense. As the research question is how Japan through Dynamic Defence Force policy to respond to North Korea's nuclear weapons development, this research aims to analyze how Dynamic Defence Force policy of Japan being able to respond and mitigate the threat posed through the ownership of its nuclear weapons by using the concept of the balance of threat and deterrence. The concept analyzes how a country is doing a balancing act as a deterrence effort to be able to protect against the threats that exist. For that Japan decided to change the concept of the defence of the Basic Defence Force into a Dynamic Defence Force, because Japan felt that the concept of the Basic Defence Force are no longer able to protect his country from the threats that exist. This research uses qualitative descriptivemethod with the use of the official documents issued by Japan and the related journals as a source of data.

Keywords: *Japan, North Korea, The Basic Defence Force, The Basic Dynamic Defence Force, Nuclear Weapons*

1. PENDAHULUAN

Gencarnya aktivitas percobaan rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara membuat Jepang gerah atas tindakan tersebut. Jepang berada sekitar 1,043 km di sebelah timur Korea .KoreaUtara memproduksi plutonium¹ untuk pembuatan senjata nuklir, dan sejak tahun 1984 Korea Utara telah berhasil

mengembangkan berbagai model senjata yang canggih seperti program “*plutoniumbased nuclear*” and “*highly-enriched-uranium (HEU) nuclear program*”. Senjata Nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara dapat dikatakan merupakan ancaman yang serius bagi Jepang, ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal beberapa kali rudal milik Korea Utara sempat melewati wilayah Jepang. Bahaya radiasi radioktive plutonium sangat mematikan karena menyebabkan kanker paru-paru, ginjal, hati dan seluruh jaringan tubuh manusia (Taylor, 1995).

¹ Plutonium adalah unsur transuranium seri aktinida yang ditemukan kedua kalinya. Isotop Pu dihasilkan pada tahun 1940 oleh Seaborg, McMillan, Kennedy dan Wahl dengan menembakkan uranium dengan deuteron ddalam siklotron 60 inchi di Berkeley, Kalifornia.

Pada tahun 1998, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dengan mengirimkan rudal bertipe Nodong dan *Taepodong-1* yang melewati Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik. Misil Taepodong II dan *Intercontinental Ballistic Missile* milik Korea Utara ini memiliki menjangkauan 3500 – 6000 km (NIDS, 2007). Pada tahun 2006, Korea Utara kembali meluncurkan serangkaian tes kekuatannya misil mereka dengan meluncurkan misil yang berbahan plutonium yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Asia Pasifik. Lalu pada tahun 2009, Korea Utara meluncurkan uji coba senjata misilnya ke wilayah Jepang yang mengakibatkan gempa 4,5 skala Rithcarr.

Ketika Korea Utara akan meluncurkan rudalnya pada April 2012 yang lalu, Menteri Pertahanan Jepang segera memerintahkan agar mengoperasikan *Ballistic Missile Defence* (BMD) yaitu sebuah sistem pertahanan yang dapat mendeteksi peluncuran rudal balistik, serta dilengkapi radar yang melacak lintasan rudal Korea Utara tersebut. BMD juga mampu menembak jatuh rudal yang melintas wilayah Jepang. Selain itu Jepang juga mengirimkan pasukan dan kapal perusak di wilayah Ichigaya sebelah timur Shinjuku, Tokyo, Jepang sebagai antisipasi peluncuran rudal tersebut (Takahashi, Sugio, 2012).

Walaupun Korea Utara tidak secara langsung menargetkan rudalnya ke teritorial Jepang, pemerintah Jepang mengkritik tajam atas uji coba senjata nuklir tersebut. Jepang memandang

bahwa pengayaan dan uji coba senjata nuklir yang dilakukan beberapa kali di atas teritorial Jepang menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kapabilitas untuk mampu menyerang Jepang. Pemerintah Jepang menyatakan "hal tersebut merupakan tindakan yang benar-benar tidak dapat diterima dan merupakan ancaman serius yang dapat mengancam keselamatan rakyat sipil (*Japan Ministry of Foreign Affairs*, 2011).

Kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara yang dapat langsung menjangkau Jepang ditambah seringnya Korea Utara melakukan uji senjata tentunya membuat Jepang merasa terancam. Salah satu respon yang dilakukan Jepang adalah dengan memperkuat kekuatan militernya dengan ditingkatkannya *Basic Defence Force Concept* menjadi *Dynamic Defence Force*. Dasar pertahanan *Basic Defence Force Concept* menitik-beratkan pada pembangunan kekuatan pertahanan yang pasif. Pasif yang dimaksud adalah Jepang hanya diperbolehkan memiliki pertahanan dan kekuatan yang minimum yang masih batas wajar. Dalam Konsep *Basic Defence Force* menyatakan bahwa Jepang siap akan mempertahankan struktur kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi suatu ancaman dengan kemampuan pertahanan yang terbatas, dan jika ancaman tersebut melebihi kapabilitas pertahanan Jepang, maka Jepang akan sebisa mungkin mempertahankan diri sampai bantuan dari Amerika Serikat datang.

Pada saat Jepang menganut konsep *Basic Defence Force*, Jepang hanya diperbolehkan memiliki kapabilitas militer yang sangat minimum dan sangat bergantung dengan Amerika Serikat terkait dengan masalah keamanan. Jepang juga tidak diizinkan untuk memproduksi, memiliki dan mengimpor senjata nuklir ataupun senjata yang bisa membuat Jepang memiliki kemampuan *preemptive strike*. *Pre-emptive strike* umumnya dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau kekuatannya yang dilakukan sebagai upaya terhadap sebuah ancaman yang dapat mengancam negaranya.

Pada *National Defence Program Guidelines* Japan (NDPG) tahun 2011, konsep dasar tersebut berubah menjadi *Dynamic Defence Force* yang memaksa *Japan Self Defence Force* yaitu tentara Jepang melakukan tindakan yang lebih aktif yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer secara rutin dan meningkatkan kapabilitas militernya. Setelah berubah menjadi *Dynamic Defence Force*, Jepang terus berupaya memperkuat pertahanannya dengan terus memperkuat sistem BMD dan Jepang juga melakukan penyebaran empat kapal perusak *aegis* yang diperlengkap-senjatai dengan rudal pencegat *Standard Missile - 3* (SM-3) dan enam belas rudal unit menembak *Patriot Advanced Capability -3* (PAC-3) (Reynolds, 2013).

2. KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami konsep *balance of threat* penulis menggunakan kajian

pustaka milik Ganesha M.Lubis yang berjudul *Strategi Jepang di Tengah Peningkatan Kekuatan Cina*. Ganesha memaparkan bahwa China sendiri saat ini merupakan negara berkekuatan besar di kawasan regional Asia Timur. Gambaran besaran kekuatan China tersebut didasari fakta mengenai *People's Liberation Army* (PLA) yang memiliki jumlah personel sebanyak 2,3 juta jiwa atau terbanyak di dunia hingga saat ini, serta perkembangan kepemilikan persenjataan nuklir.

Kekuatan militer yang dimiliki oleh China juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang diantaranya dengan dilakukannya pengembangan pesawat tempur *stealth* J-201 dan pengembangan *aircraft carrier*. Semakin kuatnya kapabilitas China bukanlah hal yang biasa, mengingat perkembangan pesawat *stealth* dengan kekuatan *offensive* yang tinggi serta kepemilikan *aircraft carrier* memperlihatkan kapabilitas angkatan laut China yang bergerak ke arah proyeksi kekuatan *blue water navy*.

China juga mulai melakukan pembaharuan kapabilitass nuklirnya, akibat dari kecilnya kapabilitas nuklirnya bila ingin meningkatkannya kemampuan *deterrence* di dunia internasional. Tidak hanya itu, salah satu rencana angkatan militer China juga mengenai kapabilitas *anti-access* dan *anti denial* yang akan membawa masalah untuk keberadaan *aircraft carrier*, landasan terbang, dan sumber logistik regional, serta pesawat-pesawat musuh, menjadi dalam keadaan bahaya.

China juga sedang meningkatkan kapabilitas misil khususnya misil jarak dekat dan juga jarak menengah untuk menanggulangi permasalahannya di selat Taiwan. Peningkatan signifikan juga dilakukan pada armada lautnya dan juga teknologi bertempur elektromagnetik untuk merusak peralatan listrik lawan. Selain perkembangan fisik, pemerintah China juga berupaya untuk meningkatkan infrastruktur militernya agar bekerja lebih efisien dan dengan teknologi informasi yang lebih tinggi.

Pengaruh dari peningkatan kekuatan pertahanan Cina terhadap kekuatan pertahanan Jepang cukup terlihat pada tahun 2009 dilansir dari *The Military Balance* 2010. Proposal anggaran dari Kementerian Pertahanan kepada parlemen difokuskan kepada peningkatan kekuatan armada fighter F-15J untuk menangkal kekuatan pertahanan udara China dan juga kapabilitas *cruise missile*. Kementerian Pertahanan juga berencana untuk meningkatkan kekuatan penangkal kapal selam dan penambahan pada unit-unit kapal perang kelas Hyuga. Jepang juga berencana meningkatkan kinerja operasi gabungan antara armada darat, laut dan udara untuk melindungi pulau-pulau terluar wilayah teritorial Jepang

Selain peningkatan pada kekuatan sistem senjata, Jepang juga pada kurun waktu 2004-2010 telah beberapa kali tergabung pelatihan militer gabungan. Pelatihan militer *Cobra Gold* dengan Thailand adalah dimana untuk kali pertama angkatan darat Jepang melakukan latihan seperti ini pada

tingkat multilateral. Latihan-latihan militer seperti *Rim of the Pacific Exercise* (RIMPAC) dan *Exercise Khan Quest* di Mongolia yaitu latihan gabungan antar negara-negara Asia Pasifik juga diikuti oleh Jepang. Pemerintah Jepang dengan Amerika Serikat menandatangani *US-Japan Defence Policy Review* Iniativ (DPRI) yang dimana salah satu memuat bahwa Jepang menambah jumlah latihan gabungann antar pasukan bersenjata kedua negara, yang salasatunya adalah latihan gabungan *Keen Edge*.

Penelitian yang ditulis oleh Ganesha memberikan kontribusi bagi penulis bagaimana melihat suatu negara melakukan upaya *balancing* terhadap suatu ancaman. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Jepang melihat peningkatan kekuatan Cina sebagai suatu ancaman. Dalam tesis ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mendorong negara untuk melakukan balance terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh suatu negara, serta menjelaskan kapan suatu negara akan melakukan *balancing*.

Kajian pustaka yang kedua adalah skripsi yang berjudul *Pengaruh Nuklir Iran Terhadap Peningkatan Postur Militerr Arabb Saudi* yang ditulis oleh Ilham Virgo. Skripsi yang ditulis Ilham berusaha menjelaskan pengaruh nuklir Iran terhadap peningkatan Postur militer Arabb Saud. Ilham memandang bahwa pengembangan teknologi nuklir Iran pada era Pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad. Sejahtera ini Republik Islam Iran telah menalakan proyek tenaga nuklir

sejak beberapa dekade lalu, tepatnya pada tahun 1950-an. Teknologi nuklir kala itu, sebagian besar diterapkan dari negara-negara Barat.

Ilham menjelaskan bahwa program nuklir yang dikembangkan oleh pemimpin Iran saat itu Ahmadinejad, selalu mencoba untuk meyakinkan dunia bahwa nuklir Iran dibuat untuk tujuan yang damai dan untuk kemajuan bangsa Iran, bukan untuk dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal seperti yang diberitakan oleh musuh Iran kepada masyarakat dunia.

Dijelaskan bagaimana nuklir bagi Iran merupakan teknologi yang prestisius yang bisa menuntun bangsa Iran melesat menjadi bangsa yang dapat dikatakan maju, karena jika Pembangkit Listrik Tenaga Nuklirnya tersebut mulai berkembang dan maju, maka anggaran dana subsidi listrik nasionalnya dapat dikurangi secara drastis. Oleh sebab itu, proyek pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Iran mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai pertama, dalam jangka panjang Iran bertujuan untuk menjadi Negara yang mandiri dalam sebuah sisi. Kedua, dalam jangka pendek, keuntungan devisa Negara yang sangat besar akan masuk ke dalam kas Negara Iran seiring dengan mulai meningkatnya harga gas dan minyak dunia, dan itu berarti kemakmuran akan segera datang bagi bangsa Iran.

Pengembangan nuklir di Iran, telah memberikan dampak yang cukup serius bagi dunia internasional khususnya di

kawasan regional Timur Tengah yakni Arab Saudi. Hal ini terlihat jelas dengan peningkatan persenjataan militer di negara-negara Timur Tengah yang disebabkan oleh pengembangan proyek nuklir yang dilakukan oleh Iran. Peningkatan pemasokan persenjataan Militer ke regional Timur Tengah telah mengkhawatirkan negara-negara di kawasan timur tengah, terlebih lagi khususnya Arab Saudi terhadap pengembangan program nuklir Iran, walaupun Iran bersikeras menyatakan sama sekali tidak mempunyai tujuan untuk mengembangkan program nuklir untuk memperkuat kekuatan pertahanan dan militernya. Namun secara garis besar data terakhir yang dirilis *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), pada bulan Maret 2010, ekspor senjata ke daerah Timur Tengah pada periode 2005-2009 mengalami peningkatan lebih dari dua puluh persen dibandingkan pada periode lima tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya, pembangunan persenjataan di Timur Tengah selalu didorong oleh adanya kecurigaan terhadap Israel yang memiliki 200 ton uranium dan menerima bantuan militer senilai jutaan miliar setiap tahun dari Amerika Serikat.

Ilham menjelaskan bahwa nuklir yang dimiliki oleh Iran menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan uang sebesar tiga puluh miliar dollar USD per tahun tiga kali lebih besar dibandingkan dengan Israel sebagai belanja perlengkapan militer. Sebagian besar anggaran itu untuk membeli sistem rudal Patriot dari

Amerika Serikat dan pada tahun sebelumnya telah membeli 72 pesawat tempur dari Inggris. Bahkan, data harian *The Wall Street Journal* menulis bahwa Amerika mempunyai rencana untuk menawarkan senjata kepada Arab Saudi dengan nominal 60 miliar dollar AS.

Menurut Ilham peningkatan persenjataan oleh Arab Saudi, telah memberikan motivasi terhadap negara Arab lainnya untuk ikut andil dalam peningkatan kapabilitas persenjataan di Timur Tengah, contohnya seperti Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman, menolak tertinggal. Mereka juga ingin memperkuat diri dengan memasok senjata dari negara Barat.

Peningkatan pacuan senjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah didorong oleh kekhawatiran oleh kebangkitan nuklir Iran, sehingga kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara penyuplai senjata, dan ini akan membuat yang masalah baru di daerah Timur Tengah. Sedangkan persoalan lama, konflik Palestina serta Israel, masih jauh dari kata yang berujung damai. Tentu hal tersebut adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Apa lagi Arab Saudi merasa terancam dengan program nuklir yang dimiliki Iran.

Skripsi yang ditulis Ilham Viro dan penelitian ini sama-sama menggunakan konsep *deterrence* untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian karya Ilham memberikan kontribusi bagi penulis dalam melihat bagaimana suatu negara melakukan *deterrence* sebagai upaya

dalam melindungi negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Ilham memaparkan bagaimana tindakan Arab Saudi dalam melakukan *deterrence* terhadap proyek nuklir Iran.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data-data atau informasi dari partisipan yang bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam mengenai suatu gejala, fakta atau realita (Dr.J.R.Raco, 2010).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berjenis deskriptif-kualitatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan beragam kondisi, situasi, ataupun fenomena realitas sosial politik yang berada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta berupaya untuk menarik realitas ini sebagai suatu tanda, model, karakter, atau gambaran akan suatu situasi, kondisi, serta fenomena tertentu. (Bungin, 2007)

Sumber data merupakan subjek yang berasal dari suatu data dapat diperoleh (Arikunto 1998). Sumber data yang dipakai adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat oleh peneliti melalui media perantara atau tidak ditulis oleh pihak lain (Indriantoro, 1999). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah online yang memaparkan mengenai

kebijakan *Dynamic Defence Force*, situs resmi pemerintah Jepang, serta penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekalahan pada saat Perang Dunia ke-II, membuat kebijakan militer Jepang terpaksa berubah bersifat pasif. Pasif yang dimaksud adalah Jepang tidak ikut andil dalam penyelesaian konflik-konflik intrernasional yang berhubungan dengan masalah keamanan atupun militer dan juga tidak akan mendukung atupun terlibat peran dan Jepang sangat mendukung adanya perdamaian dunia sehingga Jepang bersifat anti perang (Mahdi, 2006).

Disahkannya konstitusi tersebut juga membuat Jepang tidak diperbolehkan mengirimkan tentara ke luar negeri karena tentara bela diri Jepang yaitu *Self Defence Force* (SDF) fungsinya hanya sebagai tentara bela diri saja dan tidak diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata atau tentara nasional. SDF terdiri dari tiga divisi yaitu *Ground Self Defense Force*(GSDF), *Maritime Self Defense Force*(MSDF) dan *Air Self Defense Force*(ASDF) (Putro, 2012). Badan-badan tersebut yang secara khusus yang bertugas untuk mengontrol SDF. SDF sendiri dibawah sepenuhnya dibawah control *Japan Defence Agency* (JDA) yang menggantikan fungsi departemen pertahanan dan sepenuhnya berada dalam kewenangan sipil (Mahdi, 2006).

Dibawa era kepemimpinan Perdana Menteri Yoshida Shigeru mengeluarkan

sebuah doktrin yang digunakan sebagai dasar kebijakan pertahanan saat itu. Doktrin tersebut memfokuskan Jepang pada perbaikan kondisi domestiknya serta memperkuat pembangunan sektor ekonomi.

Prinsip utama dari doktrin tersebut adalah ; pasifisme yang bersumber dari pasal 9 konstitusi 1947, yang membuat Jepang kemudian menolak dorongan Amerika untuk mempersenjatai Jepang kembali dalam skala penuh ; Aliansi dengan Amerika serikat dimana Jepang mendapat perlindungan dengan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Amerika : dan akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eskpor (Laurance, 2007).

Pada 8 September 1951 akhirnya doktrin tersebut diwujudkan yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang, yang d sering dikenal dengan (*US-Japan Security Treaty*) yang kemudian diubah menjadi perjanjian kemanan bersama (*Treaty of Mutual Cooperation and Security Between United States and Japan*) pada tahun 1960. Selain menyatakan Amerika Serikat sebagai payung keamanan bagi Jepang, dalam perjanjian tersebut dalam menjaga kemanannya negaranya, pihak kepolisian Jepang dan pasukan pertahanan nasional nantinya akan dipersenjatai persenjataan ringan, ini merupakan awal terbentuknya SDF (Hughes, 2004).

Konsep *Basic Defence Force* menjujung kebijakan yang bersifa pasif karena Jepang menyatakan siap akan

mempertahankan struktur kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi suatu ancaman dengan kemampuan pertahanan yang terbatas, dan jika ancaman tersebut melebihi kapabilitas pertahanan Jepang, maka Jepang akan sebisa mungkin mempertahankan diri sampai bantuan dari Amerika Serikat datang (Hughes, 2004).

Seiring dengan berjalannya waktu Jepang kemudian dihadapkan oleh ancaman dari Korea Utara dengan senjata nuklir yang mulai dikembangkannya. Korea Utara memulai program nuklirnya pada tahun 1956 setelah di tandatanganinya perjanjian kerjasama penggunaan damai energy nuklir antara Korea Utara dan Uni Soviet.

Korea sempat mendekati Cina untuk mempelajari dan memperdalam mengenai senjata nuklir karena Cina telah berhasil melakukan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya (Perry, 2006). Keinginan Korea Utara tersebut tidak ditanggapi oleh China, dan karena dinginnya sikap China membuat Korea Utara kian mempererat hubungannya dengan Uni Soviet. Korea Utara juga mulai tertarik untuk mengembangkann kapabilitas rudal balistik sendiri. Pada tahun 1960, Korea Utara mulai memperkuat militernya. Struktur serta doktrin Korea Utara mengarah kepada bentuk ofensif (Byung-Joon, 1990).

Korea Utara pun terus meningkatkan kekuatan militernya karena adanya fasilitas nuklir di Yongbon. Doktrin dan struktur kekuatann militerr Koreea Utara saat itu berorientasii menyerang dimana

Korea Utara mencoba unntuk mengembangkan sumber daya manusia agar Korea Utara dapat memproduksi baik itu rudal, roket maupun senjata nuklir (Byung-Joon, 1990). Hal tersebut bertujuan agar Korea Utara dapat menaikan posisi tawar Korea Utara di level internasional. Hal tersebut disebabkan karena usaha komunitas internasional yang berusaha menconca untuk mengasingkan dan menjatuhkan Korea Utara . Jadi dapat dikatakan bahwa Senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara nantinya akan digunakan untuk menekan komunitas internasional.

Jepang merasa terancam terhadap uji cobba senjata nukklir yangg beberapa kali dilakukann oleh Korea Uttara. Jepang sangat mengkritik tajam atas uji coba-uji coba senjata nuklir yang beberapa kali masuk ke wilayah Jepang. Jepang mengatakan bahwa senjata nuklir, biologis, kimia dan senjata pemusnah masal lainnya merupakan sebuah ancaman besar bila di gabungkan dengan tujuan-tujuan pelepasan yang mengandung peralatan militer yang canggih. Contohnya aktifitas misil balistik Korea Utara yang jarak jangkauannya mencapai wilayah Jepang yang tentunya merupakan ancaman nyata bagi Jepang (Japan , 2002).

Berkaca dari ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir yang dimiliko oleh Korea Utara, membuat Jepang terdorong untuk melakukan *deterrenceterhadap* Korea Utara. Untuk itu pada tahun 2010 lewat *National Defence Program Guidelines* Japan (NDPG)

konsep dasar tersebut berubah menjadi *Dynamic Defence Force*. Setelah berubah menjadi *Dnyamic Defence Force*, Jepang terus berupaya untuk memperkuat kapabilitas pertahanannya.

Kebijakan *Dynamic Defence Force* sebagai bentuk tindakan Jepang dalam melakukan *deterrence*. *Deterrence* merupakan sebuah cara suatu negara untuk memengaruhi negara artinya suatu negara akan menekan negara lain untuk tidak melakukan penyerangan dalam hal ini biasanya suatu negara akan melakukan gertakan, modernisasi militer, operasi militer melalui darat maupun laut (Mas'ood, 1990). Sehingga dengan perlengkapan yang sudah dimodernisasi tersebut nantinya bisa membuat psikologis yang mengakibatkan negara lain atau musuh akan berpikir kembali untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diinginkan.

Berbeda dengan konsep yang sebelumnya digunakan yaitu *basic Defence force* yang bersifat pasif. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan Jepang menyatakan siap akan mempertahankan struktur kekuatan yang dapat digunakan untuk menghadapi suatu ancaman dengan kemampuan pertahanan yang terbatas, dan jika ancaman tersebut melebihi kapabilitas pertahanan Jepang, maka Jepang akan sebisa mungkin mempertahankan diri sampai bantuan dari Amerika Serikat datang (Hughes, 2004).

Walt berpendapat terdapat empat variabel yang menentukan seberapa besar tingkat ancaman yang dihasilkan

oleh suatu negara yang menentukan kebijakan balancing suatu negara, yaitu:

1. *Aggregate power* merupakan suatu negara yang memiliki sekumpulan kekuatan seperti contohnya kekuatan dari sektor ekonomi dan perdagangan, kemajuan teknologi dan industri, kepadatan populasi, dan kekuatan militer, adalah negara yang sebagian besar menunjukkan ancaman terhadap negara lainnya dengan menggunakan kapabilitas tersebut (Walt, 1995). *Aggregate power* Korea Utara dapat dilihat dari bagaimana keseriusan Korea Utara untuk mengembangkan proyek nuklirnya.

2. *Geographic Proximity*

Faktor kedekatan geografis antara agresor dengan negara yang terancam yang kemudian mampu menciptakan sebuah ancaman yang nyata. Faktor Kedekatan jarak antara negara agresor dengan negara defender memang mampu mempengaruhi seberapa besar tingkat ancaman. Apabila semakin dekat pusat ancaman dengan negara, maka agresor semakin cepat memproyeksikan ancaman menjadi sebuah ancaman yang besar (Walt, 1995). Jepang berada sekitar 1,043 km di sebelah timur Korea Utara. Meskipun jarak antara Jepang dengan Korea Utara tidak dapat dikatakan sangat dekat, namun Korea Utara sudah berhasil mengembangkan rudal yang dapat menyerang langsung wilayah Jepang

3. *Offensive Power*

Offensive Power adalah variabel yang berhubungan dengan karakter dari negara agresor yang memungkinkan timbulnya konflik terbuka dengan negara lainnya. Yakni bagaimana agresor memiliki kemampuan untuk memunculkan ancaman bagi negara-negara lainnya yang ikut didalam persengketaan atau konflik. (Walt, 1995) *Offensive Power* Korea Utara dapat dilihat dari bagaimana kapabilitas kekuatan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara.

4. *Offensive Intention*

merupakan perilaku agresif yang ditunjukkan oleh pihak agresor sehingga membuat negara lainnya menjadi terancam. Perilaku itu dapat dilihat dari bagaimana pemerintah agresor membuat kebijakan yang memungkinkan terjadinya konflik terbuka dengan negara lainnya (Walt, 1995). Berkaitan dengan *Offensive Intentions* dapat dilihat dari tindakan Korea Utara yang seringkali mengesampingkan *international order* dengan melakukan beberapa uji coba senjata nuklir yang meresahkan beberapa negara yang salah satunya adalah Jepang. Senjata Nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara dapat dikatakan merupakan ancaman yang serius bagi Jepang, ketika Korea Utara beberapa kali rudal milik Korea Utara sempat melewati dan jatuh dalam wilayah Jepang.

Jepang merasa terancam terhadap uji coba senjata nuklir yang beberapa kali

dilakukan oleh Korea Utara. Jepang sangat mengkritik tajam atas uji coba-uji coba senjata nuklir yang beberapa kali masuk ke wilayah Jepang. Jepang mengatakan bahwa senjata nuklir, biologis, kimia dan senjata pemusnah masal lainnya merupakan sebuah ancaman besar bila di gabungan dengan tujuan-tujuan pelepasan yang mengandung peralatan militer yang canggih. Contohnya aktifitas misil balistik Korea Utara yang jarak jangkauannya mencapai wilayah Jepang yang tentunya merupakan ancaman nyata bagi Jepang (Japan , 2002).

Tindakan Jepang merubah kebijakan militernya menjadi *Dynamic Defense Force* ini sesuai yang dikatakan oleh Spiegel yang mengatakan, bahwa terdapat tiga hal yang harus dilakukan untuk meyakinkan negara yang dianggap mengancam bahwa negara ini (Jepang) serius dalam melakukan tindakan *deterrence* ini yaitu (Speigel, 2004):

1. Komitmen

Seperti yang sudah dijelaskan dalam konsep *deterrence* bahwa Sebagai langkah awal dari *deterrence*, negara harus memiliki komitmen akan mencoba "menghukum" negara musuh yang coba berani untuk menyerang kepada negara yang bersangkutan. Dalam kata lain, negara yang sedang berada dalam kedudukan bertahan harus secara tegas memberi peringatann kepada negara yang mencoba menyerang bahwa jika negara yang menyerang melewati garis batasan tersebut penderitaanlah yang akan dirasakan olehnya. Fungsi dari *deterrence*

akan tidak berfungsi jika negara bersikap ambigu dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk "menghukum" negara yang melakukan serangan.

Komitmen Jepang dalam upaya melakukan *deterrence* dapat dilihat pernyataan Menteri Pertahanan Jepang. Menurutnya "pengembangan rudal nuklir Korea Utara menimbulkan ancaman baru ke Jepang dan seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, kami akan memastikan bahwa kami dapat mempertahankan diri dengan peningkatan drastis dalam pertahanan rudal balistik," Untuk itu Jepang merubah kebijakan militernya dari *Basic Defense force* menjadi *Dynamic Defense Force* agar dapat meningkatkan kapabilitas militernya sebagai bentuk upaya *deterrence* Jepang terhadap kepemilikan senjata nuklir Korea Utara

2. Kapabilitas

Komitmen yang jelas pun tidak akan berarti banyak jika negara tidak punya kapabilitas untuk melaksanakannya. Karena *deterrence* sendiri mempunyai tujuan untuk meyakinkan negara lain

bahwa sebuah negara melakukan sebuah kesalahan ketika menyerang negara yang sedang dalam keududukan bertahan, maka negara haruslah memiliki kekuatan berupa kapabilitas untuk menyerang balik negara lawan yang menyerang. Bahkan jika tingkat *deterrence* terlihat tidak kuat, negara harus terlihat meyakinkan musuhnya, bahwa ini bukanlah kekuatan keseluruhan yang dimilikinya.

Jepang menyadari bahwa kapabilitas mereka untuk melakukan *deterrence* masih kurang jika mereka masih menerapkan konsep *Basic Defense Force* yang bersifat pasif. Maka dari itu Jepang memutuskan untuk merubah kebijakan pertahanannya menjadi *dynamic defense force*. Setelah berubah menjadi *Dynamic Defense Force* Jepang terus meningkatkan kapabilitas militernya untuk melakukan upaya *balancing* dan *deterrence* terhadap kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara.

Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN melakukan perannya sebagai arena pada

3. Kredibilitas

Syarat yang terakhir adalah mengenai kredibilitas negara yang melakukan *deterrence*. Kredibilitas negara, masa lalu negara yang bersangkutan, dan gambaran secara umum mengenai negaranya membantu agar *deterrence* dapat berhasil. Kredibilitas menolong negara dalam menjalankan komitmen dan membangun kapabilitas agar dapat meyakinkan segingga negara lain tidak melakukan penyerangan kepada negara yang dalam posisi bertahan. Dengan kredibilitas ini dalam pikiran negara agresor, maka *deterrence* akan berjalan baik

Jepang secara terang-terangan mengkritik tajam atas kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Dapat dilihat dari bagaimana Jepang sangat mengkritik tajam atas uji coba senjata nuklir yang beberapa kali masuk ke wilayah Jepang. Jepang mengatakan bahwa senjata nuklir, biologis, kimia dan senjata pemusnah

masal lainnya merupakan sebuah ancaman besar bila di gabungkan dengan tujuan-tujuan pelepasan yang mengandung peralatan militer yang canggih. Contohnya aktifitas misil balistik Korea Utara yang jarak jangkauannya mencapai wilayah Jepang yang tentunya merupakan ancaman nyata bagi Jepang.

5. KESIMPULAN

Jepang merasa terancam terhadap uji coba senjata nuklir yang beberapa kali dilakukan oleh Korea Utara. Jepang sangat mengkritik tajam atas uji coba-uji coba senjata nuklir yang beberapa kali masuk ke wilayah Jepang. Jepang mengatakan bahwa senjata nuklir, biologis, kimia dan senjata pemusnah masal lainnya merupakan sebuah ancaman besar bila di gabungkan dengan tujuan-tujuan pelepasan yang mengandung peralatan militer yang canggih.. Contohnya aktifitas misil balistik Korea Utara yang jarak jangkauannya mencapai wilayah Jepang yang tentunya merupakan ancaman nyata bagi Jepang.

Jepang yang merasa terancam berusaha melakukan balancing dengan meningkatkan kekuatannya kapabilitas militernya dengan digantikannya *Basic Defence Force Concept menjadi Dynamic Defence Force*. Jepang merasa konsep Basic Defence Force yang dibuat pada tahun 1976 sudah tidak mampu menghadapi ancaman perkembangan nuklir dan serangkain uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara.

Jadi untuk merespon pengembangan senjata nuklir milik Korea utara, Jepang merubah kebijakannya militernya dari *Basic Defence Force* menjadi *Dynamic Defence Force*. Tindakan tersebut merupakan upaya Jepang dalam melakukan *balancing* terhadap ancaman senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Tindakan Jepang tersebut sesuai dengan konsep *Balance of threat* yang digunakan dalam penelitian ini, dimana Walt berpendapat bahwa negara negara pada umumnya bertindak menyeimbangkan ancaman terbesar bagi keamanan mereka. Kebijakan *balancing* tersebut dapat berupa strategi negara untuk meningkatkan kemampuan kapabilitas militernya untuk mingimbangi ancaman yang ada. Kebijakan *balancing* tersebut adalah upaya Jepang dalam melakukan *deterrence* terhadap Korea Utara

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Kounikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

Byung-Joon, A. (1990). In "Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur", *Masalah Keamanan Asia*.

Dr.J.R.Raco, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.

Hughes, C. W. (2004). In *Japan Re-emergence as a "Normal" Military*

Power. New York: Oxford University Press.

Mas'ood, M. (1990). *Ilmu hubungan internasional disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Perry, W. J. (2006). In "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607. 80.

Perry, W. J. (2006). In "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607. 80.

Speigel, S. (2004). In *World Politics New Era, The Third Edition*.

Walt, S. M. (1995). In *Alliance Formation and the Balance of World Power. International Security*, vol 9, No 4. The MIT Press.

Jurnal :

Japan, M. F. (2002). In *Diplomatic in Blue*.

Laurance, H. (2007). In "Japan's Proactive Foreign Policy and The Rise of The BRICS ", *Asian Perspective* vol 31, no 4.

Mahdi, A. P. (2006). *Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Dan Reaksi Negara Negara Asia Timur Dan Amerika Serikat*.

NIDS. (2007). *East Asian Strategic Review*.

Putro, E. M. (2012). In *Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Reynolds, I. (2013). *Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years*.

Sunchindah, A. (2015). *Transboundary Haze Pollution Problem in Southeast Asia: Reframing ASEAN's Response*. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia).